

INFO LEGISLASI

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM

10 Agustus 2022

**RUU tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat**



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

RUU tentang Advokat merupakan RUU usul inisiatif DPR. RUU ini merupakan RUU kumulatif terbuka akibat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain: Putusan MK No. 066/PUU-II/2004, No. 101/PUU-XII/2009, No. 014/PUU-IV/2006. Saat ini draf NA dan RUU tersebut sedang dalam tahap penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Penyusunan NA dan RUU tersebut terkait dengan beberapa hal berikut, antara lain: a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian MK sehingga menciptakan keadaan hukum baru; b. berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan; c. Pendidikan Khusus Profesi Advokat diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan d. organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan Advokat dalam berserikat dan berkumpul.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN *WEBSITE* PUSAT PUU
DENGAN *SCAN BARCODE* DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

10 Agustus 2022

RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan merupakan RUU usul inisiatif DPR. Saat ini draf NA dan RUU tersebut sedang dalam tahap penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Pendidikan Kedokteran Hewan di Indonesia memiliki makna yang besar bagi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan hewan sebagai sistem penjaminan mutu bagi keamanan pangan asal hewan, kesejahteraan manusia, dan pelestarian lingkungan. Saat ini, peraturan terkait pendidikan kedokteran hewan di Indonesia berdasarkan pada peraturan terkait pendidikan tinggi, sementara peraturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakomodir hal-hal khusus untuk meningkatkan kompetensi dokter hewan. Agar sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tercermin dalam konsep *One Health* (suatu upaya kolaboratif dari berbagai sektor, utamanya kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mencapai kesehatan yang optimal), diperlukan perundang-undangan yang khusus mengatur pendidikan kedokteran hewan.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan antara lain yaitu: a. Makin meningkatnya kebutuhan akan dokter hewan di masyarakat; b. Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pendidikan tinggi kedokteran hewan; c. Saat ini pendidikan kedokteran hewan masih mengacu kepada UU tentang pendidikan tinggi pada umumnya; d. Belum adanya pendidikan spesialis untuk kedokteran hewan.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN *WEBSITE* PUSAT PUU
DENGAN *SCAN BARCODE* DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN

10 Agustus 2022

**RUU tentang
Kewirausahaan Nasional**



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

RUU tentang Kewirausahaan Nasional merupakan RUU usul inisiatif DPR. Saat ini NA dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional sedang dalam tahap penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Penyelenggaraan kewirausahaan masih tersebar dalam beragam program kerja beberapa kementerian/lembaga yang belum terkoordinasi atau bahkan terintegrasi. Selain itu anggaran negara untuk pengembangan kewirausahaan ini juga tersebar di 19 kementerian/lembaga (K/L). Jika dilihat dari aspek legislasi terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait kegiatan wirausaha maupun tentang pengembangan kegiatan kewirausahaan dimana peraturan ini menjadi sangat parsial karena dibentuk di masing-masing kementerian/lembaga untuk menjalankan program terkait kewirausahaan. Oleh karena itu perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek kewirausahaan secara komprehensif agar pengembangan penyelenggaraan kewirausahaan nasional menjadi lebih terarah dan tertata.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunan antara lain yaitu: a. Pengaturan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat parsial sehingga perlu pengaturan yang lebih komprehensif, terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam UU tersendiri guna menjamin kepastian hukum; b. Persoalan *mindset* (cara berpikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berpikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah; c. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga; d. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan wirausaha sulit untuk mengakses permodalan; dan e. Regulasi yang tidak mendukung wirausaha dan belum adanya sistem informasi tentang kewirausahaan yang valid dan terintegrasi.



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

**SAHABAT PUSAT PUU DAPAT MENGAKSES INFO
LEGISLASI DI LAMAN *WEBSITE* PUSAT PUU
DENGAN *SCAN BARCODE* DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr